



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR-RI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DI BANDUNG JAWA BARAT
DALAM RANGKA PENINJAUNAN KINERJA PERUSAHAAN**

PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023

2 - 4 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja ke PT Perkebunan Nusantara VIII di Provinsi Jawa Barat didasarkan pada aturan pada undang-undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023, dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023.

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-103	MOHAMAD HEKAL, M.B.A.	PIMP. F.GERINDRA
2.	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F.PDIP
3.	A-232	I NYOMAN PARTA, S.H.	F.PDIP
4.	A-251	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.	F.PDIP
5.	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.	F.PDIP
6.	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.	F.PG
7.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H, M.M.	F.PG
8.	A-290	BUDHY SETIAWAN	F.PG
9.	A-65	ANDRE ROSIADE	F.GERINDRA
10.	A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	F.NASDEM
11.	A-384	M. SYAMSUL LUTHFI, S.E.	F.NASDEM
12.	A-25	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP.	F.PKB

13.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F.PKS
14.	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.	F.PKS
15.	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN
16.	A-500	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.	F.PAN
17.	A-472	H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.	F.PPP

C. Objek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah PT Perkebunan Nusantara VIII di Bandung Provinsi Jawa Barat.

D. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dan operasional PT Perkebunan Nusantara VIII di Provinsi Jawa Barat terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI.

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

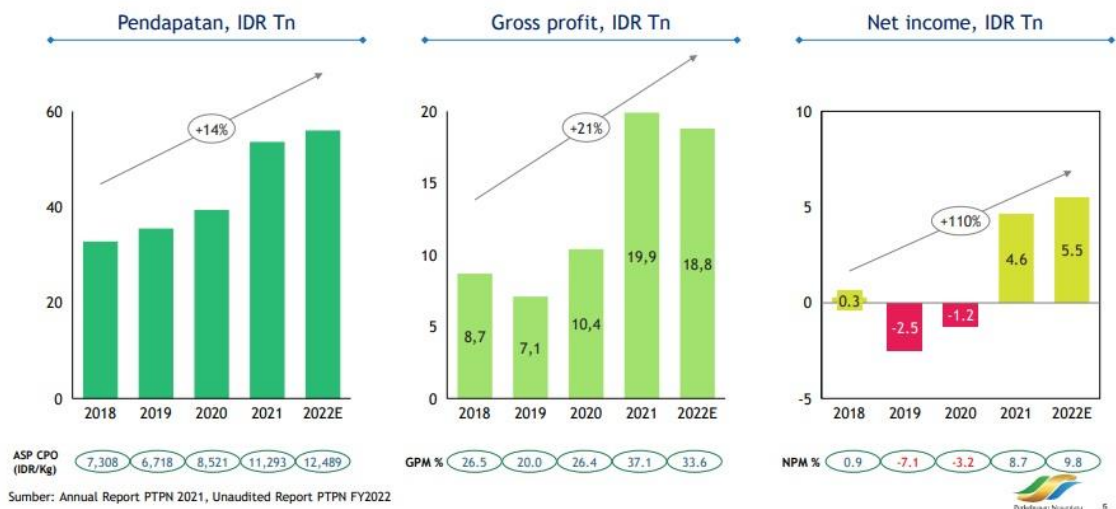
PT Perkebunan Nusantara VIII adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia di bawah Holding Perkebunan PT Perkebunan Nusantara III yang menjalankan berbagai bisnis komoditi perkebunan seperti teh, karet, sawit dan Kopi. Dengan perkebunan teh terbesar dan terluas di Indonesia, perkebunan sawit yang tersebar di Jawa Barat dan Banten, serta perkebunan Karet yang tersebar di wilayah Jawa Barat, PT Perkebunan Nusantara VIII memiliki peranan yang besar sebagai penggerak dan pendorong perekonomian di Jawa Barat. Dalam laporan kinerja tiga tahun terakhir ini menunjukkan kondisi yang stagnan dan tidak bertumbuh. Hal tersebut kemudian akan menjadi perhatian khusus bagi Komisi VI DPR RI yang berharap perusahaan tersebut dapat terus berkembang.

Meskipun kinerja keuangan secara holding dibawah PT Perkebunan Nusantara III terus meningkat, namun perkembangan kinerja operasional dan keuangan PT Perkebunan Nusantara VIII selama 3 Tahun terakhir terjadi penurunan produksi, omset dan terjadinya kerugian yang terus menerus. Produksi Teh dan Karet terus menurun, hanya produksi kelapa sawit yang

meningkat pada tahun 2022. Sedangkan omset pada tahun 2020 adalah 1,18 Triliun, 2021 1,55 Triliun dan 2022 1,41 Triliun (unaudited), dengan kerugian pada tahun 2020 269,86 Miliar, 2021 473,49 Miliar dan 2022 119,43 Miliar (unaudited).

Kinerja keuangan PTPN terus meningkat di 3 tahun terakhir, dan berpotensi untuk terus meningkat

#PTPNJUARA #PTPNKEBANGGANBARUINDONESIA



PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) dimulai sejak tahun 1996 dengan pendirian PT Lysander Camelia Nusantara (PT LCN) sebagai perusahaan patungan antara perkebunan Group Jabar (Sekarang PTPN VIII) dengan Lysander Food Service PTE LTD. Kemudian pada tahun 1998, PT LCN dilikuidasi (seluruh asset & SDM menjadi PTPN VIII) dan pendirian unit usaha pengepakan teh (UUPT) PTPN VIII. Pada 1 April 2009 Manajemen Industri teh dipisahkan dari kantor pusat PTPN VIII dan dipimpin oleh Manager menghasilkan produk hilirisasi teh dengan merek Walini, Nusakita, Goalpara dan Gunung Mas.

Untuk pasar ekspor, pada tahun 2022 PTPN VIII telah mampu menjual teh ke Canada, USA dan UEA dengan omset sebesar Rp.875 juta. Terjadi penurunan ekspor sejak 5 tahun terakhir, disebabkan menurunnya penjualan *direct sales*. *Intertrading* terjadi disebabkan masih melimpahnya impor teh ke Indonesia. Upaya peningkatan dilakukan dengan secara bertahap menambah jalur pemasaran supaya angka ekspor meningkat salah satunya melalui

platform digital. Hal serupa juga terjadi pada komoditas karet yang disebabkan areal TM (Tanaman Menghasilkan) yang semakin menurun dan tidak ada replanting. Karet sintetis mulai berkembang sejak permintaan karet alam tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Penyediaan tenaga kerja juga semakin sulit, disebabkan persaingan sector industry dan upah.

Dalam penyerapan tenaga kerja lokal PT Perkebunan Nusantara VIII di Provinsi Jawa Barat, presentase karyawan pelaksana sebanyak 95,83% adalah penduduk lokal. Kebun yang ada di PTPN VIII merupakan warisan zaman Belanda yang memiliki mata pencaharian sebagai petani kebun. Lokasi kebun PTPN VIII jauh dari perkotaan, sehingga mayoritas tenaga kerja dipenuhi oleh tenaga kerja lokal secara turun temurun. Jumlah SDM saat ini ada 13.204 orang yang terdiri dari 550 karyawan pimpinan dan 12.654 karyawan pelaksana.



Peran PT Perkebunan Nusantara VIII dalam membantu pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa barat dan lingkungan perusahaan (Real 2018 – 2022) dikontribusikan melalui; Sektor pajak sebesar Rp.530,70 Miliar, Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) sebesar Rp.8.23 Miliar, Penyediaan Fasos dan Fasum seluas 966,86 Hektar, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun (PMDK) seluas 2.007,03 Hektar, Program rehabilitasi

Lahan kritis seluas 166,04 Hektar dan Program Peremajaan Sawit rakyat (PSR) seluas 750 Hektar.

Kolaborasi dan Sinergi PTPN VIII sebagai Agent of Development Pembangunan di Jawa Barat & Banten



Geothermal dan Jalur Pipa Gas

PT Pertamina EP Asset 3, PT Geo Dipa Energi

Kerjasama pemanfaatan lahan PTPN VIII untuk pembangunan sumber energi panas bumi dan jalur pipa gas.

- Lokasi : Rancabolang, Jalupang dan Wangunreja
- Luas Lahan : 18 Ha



Pengembangan Jalan Tol Serang Panimbang

Kementerian PUPR, Pemkab Lebak

Penyediaan lahan PTPN VIII untuk Pengembangan Jalan Tol Serang panimbang

- Lokasi : Kebun Bojong Datar, Kab. Lebak, Provinsi Banten
- Luas Lahan : ± 26,43 Ha



Tapak Tower PT PLN

PT PLN (PERSERO)

Pelepasan lahan PTPN VIII untuk Pembangunan Proyek Strategi nasional (PSN) tapak tower

- Mitra : PT PLN (PERSERO)
- Lokasi : Kebun Cisolak baru, Bojongdatar, Kertajaya, Pasirbadak
- Luas Lahan : 1,03 Ha



Bedungan Karian

Kementerian PUPR, Pemkab lebak

Penyediaan lahan PTPN VIII untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karian

- Lokasi : Kebun Cisolak baru
- Luas Lahan : ± 36,23 Ha



Jalur Penyelamatan dan Perbaikan Badan Ruas Jalan Subang

Pemkab Subang, Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jabar

Penataan Jalur Penyelamatan dan Perbaikan Alinyemen ruas Jalan Subang

- Lokasi : Kebun Clater
- Luas Lahan : 21,18 Ha



Program Ketahanan Pangan

TNI AD






Kerjasama pemanfaatan lahan PTPN VIII untuk mendukung terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan baik jumlah maupun mutu.

- Lokasi : Kebun Pasirbadak, Afdeling Ciemas
- Luas Lahan : 980,33 Ha

Kolaborasi dan sinergi PTPN VIII sebagai *agen of development* pembangunan di Jabar dan Banten juga dilakukan melalui; Geothermal dan jalur pipa gas dengan PT Pertamina EP Asset 3 dan PT Geo Dipa Energi, Tapak Tower PT PLN (Persero), Jalur penyelamatan dan perbaikan badan ruas jalan Subang Bersama Pemkab Subang dan Bina Marga, Pengembangan Jalan Tol Serang Panimbang Bersama Kementerian PUPR dan Pemkab Lebak, Bendungan Karian BBWS – Kementeriann PUPR dan Pemkab Lebak, serta Program Ketahanan Pangan Bersama TNI AD yang berlokasi di Kebun Pasirbadak, Afeding Ciemas seluas 980,33 Hektar.

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Jawa Barat Peran PT Perkebunan Nusantara VIII telah menyalurkan Rp.3,4 M dengan 41 mitra dalam 5 tahun terakhir. Penyaluran pinjaman modal kerja diprioritaskan untuk kelompok usaha mikro & kecil yang secara profil usaha belum memenuhi persyaratan pendanaan oleh perbankan. Pendanaan diutamakan untuk bidang usaha yang sejalan dengan proses bisnis perusahaan.

Beberapa Bidang Kerjasama yang telah berjalan di PTPN VIII

<p>1</p>  <p>Bidang Peternakan Sapi Perah</p> <p>Penyediaan lahan PTPN VIII untuk Pengembangan peternakan sapi perah.</p> <p>1. Kandang Sapi</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebun Sinumbra Luas : House Of Cattle : 30,01 Ha; Development Area : 99, 52 Ha Mitra : Frisian Flag Kebun Ciater Pangheotan Luas : 30,77 Ha Mitra : Ultrajaya Milk Industry <p>2. Pakan Ternak</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebun Jalupang (±700 Ha) Mitra : Frisian Flag Kebun Panglejar (±186,27 Ha) Mitra : Frisian Flag, Ultrajaya Milk Industry Kebun Ciater Pangheotan (63,80 Ha) Kebun Montaya (136,75 Ha) <p>3. Tanak Sapi Perah (Dairy Milk)</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi pengembangan hingga 12.000 ekor sapi 	<p>2</p>  <p>Bidang Pariwisata Kawasan Wisata</p> <p>Pembentukan dan pengembangan kawasan wisata</p> <p>Eksisting :</p> <p>64 Mitra kerja sama tersebar di wilayah kerja PTPN VIII</p> <p>Potensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Zona wisata Ciater - Subang (Agrowisata, Edukasi Agro, wisata alam, theme park, dll) Luas pengembangan : 1.582,51 Ha Zona wisata Gunung Mas - Bogor (Sport tourism, leisure development, theme park, agrotourism) Luas areal potensi : ±150,55 Ha Kebun Rancabali, Afd. Sinumbra - Bandung Barat (Objek Danau – Situ Nyonya) Luas areal potensi : ±21,95,95 Ha Kebun Pasirbadak - Sukabumi <ol style="list-style-type: none"> Tenjo Resmi (penginapan dengan view panorama laut) – Luas : 85 Ha Sawarna (Destinasi wisata pantai) – Luas 56 Ha Adventure Land - Megamendung a. Luas areal potensi: 73,23 Ha 	<p>3</p>  <p>Bidang Energi PLTM, PLTB</p> <p>Mengembangkan sumber energi terbarukan</p> <ol style="list-style-type: none"> PLTM <ol style="list-style-type: none"> Indragiri (Sinumbra Ciwidey) Sukaati 1 & 2 (Sinumbra Ciwidey) Cukup (Sinumbra Ciwidey) Cinangling (Tambaksari Subang) Cjambe (Tambaksari Subang) Gunggung Tua (Tambaksari Subang) Malabar (Malabar) PLTB (Potensi) : <ol style="list-style-type: none"> Ciemas (270 Ha; potensi : 100 mW) Sancang (1500 Ha; potensi : 100 mW) Bunisarlendra (150 Ha, potensi : 100 mW) 	<p>4</p>  <p>Bidang Properti Kawasan Terpadu</p> <p>Pengembangan bidang properti Kawasan Non TOD Walini</p> <p>Luas : 962,72 Ha (Status HPL) Potensi : Kawasan Terpadu (Kawasan Properti Perdagangan dan Jasa)</p> 
---	---	--	--

Penggunaan CSR PT Perkebunan Nusantara VIII direalisasikan dengan penyaluran Rp.4,75 Miliar dalam 5 tahun terakhir, dengan komposisi 69% untuk social, 13% untuk Pendidikan, 11% untuk lingkungan dan 7 % untuk Kesehatan. Pemberian CSR dalam bentuk fisik infrastruktur maupun bentuk lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan.

Township Walini Raya



Informasi Aset

Lokasi Lahan	: Kab. Bandung barat – Jawa barat
Luas Lahan	: 1.270 Ha
Peruntukan	: <i>Township Development</i>
Aksesibilitas	: <ul style="list-style-type: none"> Dekat dengan akses tol Cikampek-Padalarang (Cipularang) ± 76 km dari Kota Jakarta ± 40 km dari Kota Bandung

Gambaran Umum :

Konsep desain Kota Walini Raya yang merupakan kawasan berkembang, dimana didalamnya terdapat areal yang berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan industri dan komersial (residensial, bisnis dan sebagainya).

Progress :

- Telah diterbitkan laporan hasil reviu BPKP
- Telah diterbitkan Nota Pendapat dari Jamdatu
- Telah ditandatangani perjanjian pendahuluan oleh Direktur PTPN VIII.
- Telah dibuatkan Kajian Legal terkait pengembangan Walini
- Telah terbit PKKPR KBLI wisata agro 1.270 Ha.
- Telah Dikirimkan file kronologis Walini ke jamdatun.

Rencana Tindak Lanjut :

- Pembuatan Manajemen Resiko terkait pengembangan Walini.
- Permintaan notulen penetapan inisiasi mitra dari Holding.
- Penyusunan FS Township Walini Raya.
- Proses Perijinan Walini akan dilanjutkan oleh mitra (Pertek air limbah, andalalin, Amdal, IMB, dll).

Timeline :



Konsep desain Kota Walini Raya yang merupakan kawasan berkembang, dimana didalamnya terdapat areal yang berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan industri dan komersial (residensial, bisnis dan

sebagainya). Lokasi Lahan berada di Kabupaten Bandung barat Jawa barat dengan Luas Lahan: 1.270 Ha diperuntukan Township Development. Aksesibilitas dekat dengan akses tol CikampekPadalarang (Cipularang), ± 76 km dari Kota Jakarta, ± 40 km dari Kota Bandung.

Progressnya saat ini telah diterbitkan laporan hasil reviu BPKP dan telah diterbitkan Nota Pendapat dari Jamdatun, telah ditandatangani perjanjian pendahuluan oleh Direktur PTPN VIII, telah dibuatkan Kajian Legal terkait pengembangan Walini. Telah terbit PKKPR KBLI wisata agro 1.270 Ha dan file kronologis Walini telah dikirimkan ke Jamdatun. Rencana Tindak Lanjut akan dilakukan pembuatan Manajemen Resiko terkait pengembangan Walini, permintaan notulen penetapan inisiasi mitra dari Holding dan penyusunan FS Township Walini Raya, serta proses Perijinan Walini akan dilanjutkan oleh mitra (Pertek air limbah, andalalin, Amdal, IMB, DII).

Kendala yang dihadapi PT Perkebunan Nusantara VIII adalah dalam isu Operasional dan Keuangan diantaranya; Upah masih rendah, Kewajiban penyelesaian utang masa lalu yang besar (900 Miliar diluar Utang Bank), Overstaffing karyawan dan pimpinan, Produktivitas Komoditi Rendah, Harga jual komoditi teh dan karet rendah, Harga pokok produksi komoditi tinggi, Kapasitas pabrik terpakai masih rendah. Dukungan yang diharapkan dari Komisi VI DPR RI adalah percepatan perubahan status dari HGU ke HPL dan Kewajiban pelepasan areal sebesar 20% dari total areal yang dimohon untuk perpanjangan HGU/perubahan menjadi HPL agar dikecualikan.

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan dengan PT Perkebunan Nusantara VIII pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra Komisi VI DPR RI yang diundang dalam pertemuan kunjungan kerja spesifik ini. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI menyoroti kinerja perusahaan PT Perkebunan Nusantara VIII meskipun dalam kondisi rugi, masih banyak potensi yang dapat dioptimalkan untuk menyikapi dinamika bisnis dan perkembangan global.

2. Komisi VI DPR RI juga mendalami mekanisme kerja PT Perkebunan Nusantara VIII dan memberi masukan terkait produksi dan kemasan produk sebagai program hilirisasi hasil perkebunan.

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN



V. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah PT Perkebunan Nusantara VIII di Bandung Provinsi Jawa Barat pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 2 Februari 2023
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI
Ke Bandung Jawa Barat

TTD

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.

A-103